



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iii
Intisari	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Skema dan Tabel	xii

BAB I PENDAHULUAN

A	Latar Belakang	1
B	Perumusan Masalah	17
C	Tujuan Penelitian	17
D	Kegunaan Penelitian	18
E	Keaslian Penelitian	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Negara Hukum dan Unsur-Unsurnya	23
B	Hubungan Produk Hukum dan Konsesus Politik	41
C.	Konfigurasi Politik Dalam Keadaan Transisi	51
D	Politik Hukum dan Politik Perundang-Undangan	60
F	Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman	67
G	Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman	82

BAB III METODE PENELITIAN

A	Jenis dan Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian	90
B	Data dan Bahan Penelitian	95
C	Metode dan Cara Pengumpulan Data	96
D	Keterbatasan dan Kendala Penelitian	101
E	Teknik Analisis/Pengolahan Data	102
F	Tahapan Penelitian	103
G	Sistematika Penulisan	105



BAB IV PENUANGAN MAKNA JAMINAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

A	Perumusan Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perubahan UUD 1945	109
1	Faktor Pendorong Perlunya Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman	109
2	Pembahasan dan Perumusan Perubahan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945	125
B	Penuangan Makna Jaminan Kemerdekaan Institusional	149
1	Penerapan Sistem Satu Atap dan Sistem Kamar	149
2	Pembentukan Peradilan Khusus	179
3	Pelebagaan <i>Judicial Review</i>	195
C	Penuangan Makna Jaminan Kemerdekaan Personal Kekuasaan Kehakiman	216
1	Pembenahan Pengisian dan Pemberhentian Hakim	216
2	Penataan Status Jabatan Hakim	249
D	Penuangan Makna Jaminan Akuntabilitas kemerdekaan Struktural	263
1	Keterbukaan Informasi di Peradilan	263
E	Penuangan Jaminan Akuntabilitas Personal	283
1	Pembentukan Komisi Yudisial	283
2	Pembentukan Lembaga Pengawas Kehormatan Hakim Konstitusi	302

BAB V IMPLIKASI PENUANGAN JAMINAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 DAN DESAIN PEMBENAHANNYA

A	Implikasi Penuangan Makna Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman	318
.1	Implikasi Institusional	318
a.	Satu Atap seolah menjadi Harga Mati	318
b.	Kadar Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Khusus	342
c.	Disintegrasi pelembagaan <i>Judicial Review</i>	364
2	Implikasi Personal	384
a.	Status Hakim sebagai Pejabat Negara	384
b.	Sinkronisasi Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Hakim	401
3	Implikasi Akuntabilitas Institusional dan Personal	424
a.	Keterbukaan Akses Terhadap Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	424
b.	Tendensi minimalisasi fungsi Komisi Yudisial	437



B	Desain Penyempurnaan Penuangan Makna Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman	470
1	Melepaskan Belenggu Pemaknaan Sempit	470
2	Pengembangan Sistem Pembagian Tanggung Jawab (<i>Shared Responsibility</i>)	480
3	Mengintegrasikan Pelembagaan <i>Judicial Review</i>	491
4	Realisasi Pemenuhan Hak dan Fasilitas Jabatan Hakim	509
5	Pembenahan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim	523
6	Optimalisasi Fungsi Komisi Yudisial dan Komisi Independen Lainnya	541
7	Pembentukan UU <i>Contempt of Court</i>	549

BAB VI PENUTUP

A	Kesimpulan	567
B	Saran	574
	Daftar Pustaka	579
	Riwayat Peneliti	621



DAFTAR SKEMA DAN TABEL

Daftar Skema

Skema. 1	Konstelasi hubungan antar Sub-Sistem Sosial	45
Skema 2.	Konstelasi Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman	73

Daftar Tabel

Tabel 1	Deskripsi Orisinalitas Penelitian	21
Tabel 2	Perbandingan pandangan mengenai prinsip negara hukum oleh sejumlah sarjana dan lembaga internasional	39
Tabel 3	Jenis intervensi eksternal dan internal terhadap institusi atau personal kekuasaan kehakiman	79
Tabel 4	Ruang Lingkup Penelitian	93
Tabel 5	Perbandingan Pengaturan Administratif Kekuasaan Kehakiman Antara UU No. 14 Tahun 1970 dengan UU No. 35 Tahun 1999	155
Tabel 6	Pemetaan Organisasi Mahkamah Agung setelah Penerapan Sistem Satu Atap	169
Tabel 7	Kategorisasi Syarat Pengangkatan Hakim Agung	215
Tabel 8	Kategorisasi jenis dan mekanisme Pemberhentian Hakim Agung	232
Tabel 9	Konsep Yuridis Pengangkatan Hakim Konstitusi	234
Tabel 10.	Kategorisasi jenis dan mekanisme Pemberhentian Hakim Agung	239
Tabel 11	Perkembangan historis regulasi kedudukan dan status jabatan hakim berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman	252
Tabel 12	Perkembangan historis regulasi kedudukan dan status jabatan hakim berdasarkan UU Kepegawaian	254
Tabel 13	Perkembangan historis regulasi kedudukan dan status jabatan hakim berdasarkan UU Badan Peradilan	255
Tabel 14	Perkembangan regulasi kedudukan dan status jabatan hakim berdasarkan UU UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	256
Tabel. 15	kurikulum pendidikan dan latihan pada Balitbang Diklat Kumdil MA	257
Tabel 16	Organ Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan	276
Tabel 17	Lembaga Pengawas Perilaku Hakim Konstitusi	308
Tabel 18	Pelaksanaan Seleksi Calon hakim Agung Tahun 2006-	399



	2015					
Tabel 19	Hakim-Hakim	Konstitusi	Berdasarkan	Lembaga	415	
	Pengusulnya					
Tabel 20	Rincian laporan	Pengaduan	KY		450	
Tabel 21	Regulasi	Kewajiban	bagi	Para Hakim	untuk	455
	Berintegritas					
Tabel 22	Perbandingan	Jumlah	Penerimaan	Perkara	<i>Judicial</i>	490
	<i>Review</i>	di MK	dan di	MA		